



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

TAHUN

2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2022. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviutas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2022.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendaan penggunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Stlanakantuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bangka Tengah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangka Tengah, Februari 2023

KEPALA SATUANPOLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH



Drs. IRWAN, M.Tr.IP

NIP 196811281988101001

Pembina Utama Muda/IV c

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	8
D. Landasan Hukum	14
E. Sistematika	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
B. Rencana Kinerja Tahun 2020	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Realisasi Anggaran	47
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
BAB IV PENUTUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

1. Tupoksi

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Pelayanan di bidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

a. Tugas

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP dan sub kebakaran dan penyelamatan) yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

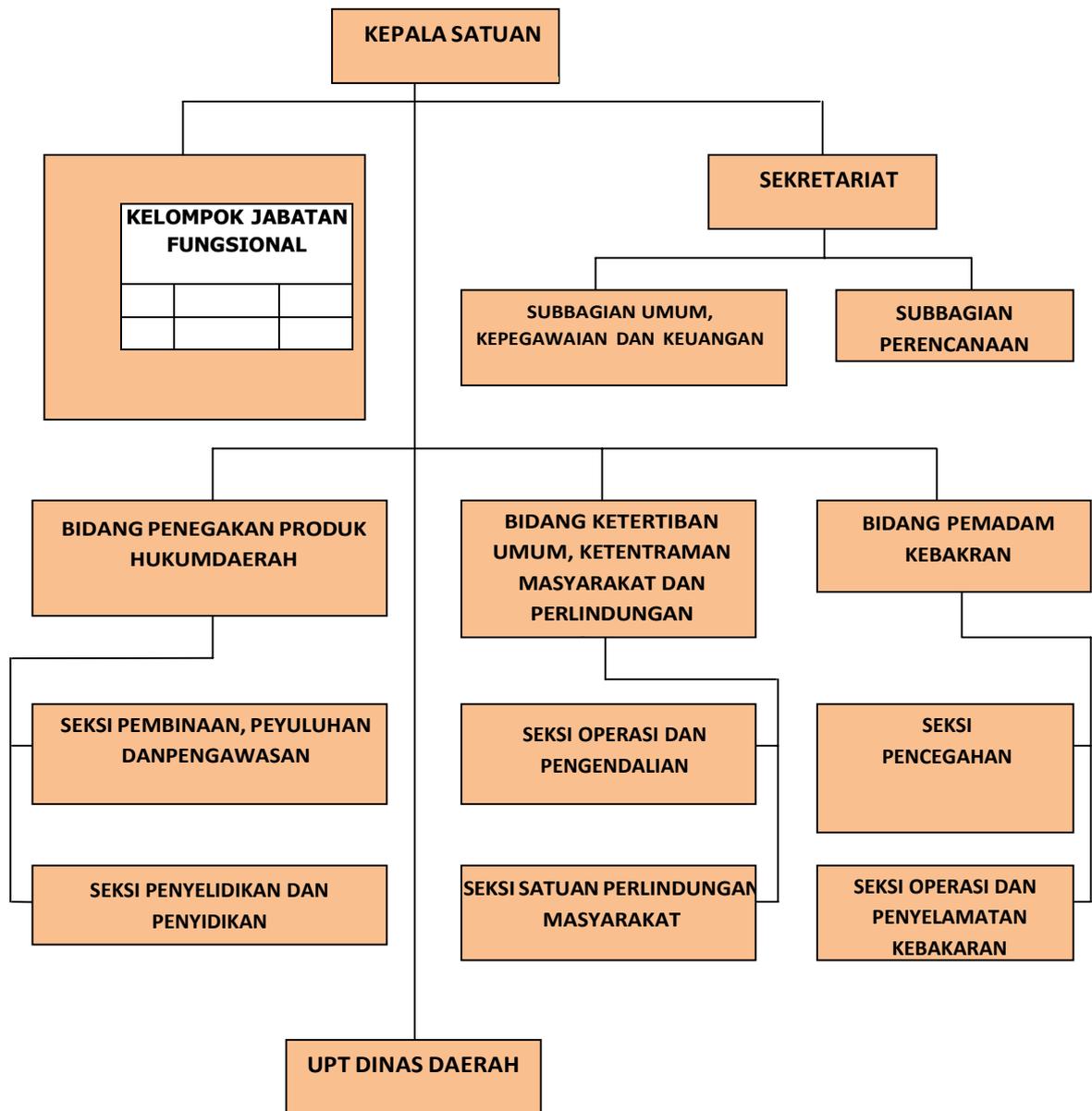
- a. Kepala Satuan ;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
- d. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana;
- f. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
- g. Subbagian Perencanaan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Satuan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah
 dapat di gambarkan sebagai berikut :



3. SDM Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah mempunyai pegawai sebanyak 640 orang dengan susunan sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan dan Eselon ;

No.	Jabatan	Eselon	Laki – laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Kepala SATPOL – PP	II b	1	-	1 Orang
2.	Sekretaris	III a	1	-	1 Orang

3.	Kepala Bidang	III b	3	-	3 Orang
2.	Kepala Seksi	IV a	5	1	6 Orang
3.	Kepala Subbag	IV a	1	1	2 Orang
4.	Staf/fungsional	-	-	2	2 Orang
5.	Staff Honorer	-	3	4	7 Orang
7.	Penjaga kebersihan kantor Non PNS	-	1	-	1 Orang
8.	Anggota SATPOL-PP PNS	-	16	2	18 Orang
9.	Anggota SATPOL-PP honorer	-	138	16	154 Orang
10	Anggota Damkar		24	0	24 Orang
11	Anggota LINMAS – PTT	-	422	-	422 Orang
Jumlah			614	26	640

b. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan :

No.	Pendidikan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
	PNS			
1.	Strata 2 (S-2)	3 orang	-	3 Orang
2.	Strata 1 (S-1)	5 Orang	3 Orang	8 Orang
3.	Sarjana Muda / DIII	-	2 Orang	2 Orang
4.	SLTA / SMK	16 Orang	2 Orang	14 Orang
Total PNS		25 Orang	7 Orang	32 Orang

c. Jumlah pegawai berdasarkan golongan :

No.	Golongan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
	PNS			
1.	IV	2 Orang	-	2 Orang
2.	III	8 Orang	3 Orang	11 Orang
3.	II	16 Orang	3 Orang	19 Orang
Total PNS		26 Orang	6 Orang	32 Orang

4. Aset

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

No.	Peralatan	Jumlah
1	Station Wagon/Truck Dalmas	1
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	2
3	Truck + Attachment/Truck Tangki Air	1
4	Pick Up	3
5	Sepeda Motor	17
6	Mobil Pemadam Kebakaran	2
7	Gerobak dorong/Arko	1
8	Peralatan Las Karbit	1
9	Dongkrak Hidrolik	2
10	Global Postioning System	1
11	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1
12	Lemari Besi/Metal	8
13	Filing Cabinet Besi	11
14	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1
15	Lemari Kaca	6
16	Lemari Makan	2
17	White Board	4
18	Mesin Absensi	1
19	Hand Metal Detector	2
20	LCD Projector/Infocus	1
21	Papan Nama Instansi	1
22	Teralis	15
23	Papan Billboard	7
24	Kursi Besi / Metal	4
25	Meja Rapat	1
26	Meja 1/2 Biro	24
27	Kasur/Spring Bed	2
28	Meja Makan Kayu	1
29	Kursi Rapat	50
30	Kursi Putar	4
31	Kursi Biasa	6
32	Meja Komputer	2
33	Sofa	4
34	Meja Biro	7
35	Tenda	2
36	Mesin Pemetong Rumput	2
37	A.C. Split	3
38	Kipas Angin	10
39	AC Unit	1
40	Kompore Gas (Alat Dapur)	3
41	Televisi	2
42	Wireless	1
43	Megaphone	2
44	Camera Video	1
45	Tiang Bendera	2
46	Dispenser	2
47	Valbed	40
48	Generator Set/Genset	1
49	Tameng	32
50	Rompi	40
51	Helm	20
52	Pompa Kebakaran/Portable	1
53	Pakaian Panas/Lengkap	12
54	Topeng (masker) Oxigen	10

55	Alat Pembantu Kebakaran	42
56	Lemari Besi	10
57	Lampu Senter	2
58	Selang	16
59	Sepatu	57
60	Tombak	1
61	Helm Damkar	27
62	Kapak Damkar	3
63	Sarung Tangan Tahan Api	2
64	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2
68	Pesawat Telephone	3
69	Handy Talky (HT)	31
70	Sentral Telepon Lapangan	2
71	Antena Hustler HT	1
72	Unit Tranceiver FM	1
73	Self Supporting Tower	1
74	Thermometer Oral, Air Raksa	1
75	Internet	2
76	P.C. Unit	10
77	Lap Top	6
78	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1
79	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8
80	Alat Selam Seet	1
81	Pakaian Penyelamatan (Jumpsuit Rescue)	5
82	Helm Penyelamatan (Rescue Helm)	5
83	Topi Lapangan	6
84	Adaptor Selang Damkar	2
85	Lampu Lalu Lintas (Tongkat Lalin)	20
86	Borgol	20
87	Sarung Borgol	20
88	Pentungan	21
89	Tangga Alumunium	1

Satuan Polisi Pamong Praja masih membutuhkan banyak sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran anggota SATPOL - PP dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya.

Adapun sarana dan prasarana yang masih diperlukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Mobil Patroli
2. Mobil angkut barang sita (Truk)
3. Mobil alat angkut orang (Bus)
4. Air Soft Gun
5. Kendaraan Pengenalian Masa (Dalmas)

C. ISU STRATEGIS PRANGKAT DAERAH

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai mana tertuang pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja periode 2021-2026.

Berdasarkan fakta yang ada, permasalahan yang selama ini masih sering menjadi kendala bagi satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Jumlah Peraturan Daerah dan Kasus pelanggaran terhadap Peraturan Daerah semakin meningkat;
2. Pengetahuan dan ketrampilan anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang masih perlu ditingkatkan;
3. Diklat Ketrampilan Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang mendapatkan perhatian;
4. Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas masih rendah;
5. Kurangnya dukungan lembaga social lainnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
6. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas
7. Peralatan penanggulangan bencana masih minim.

Berdasarkan isu - isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan).

Identifikasi keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menentukan tujuan, sasaran, dan strategi dan kebijakan yang akan diambil

dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Analisis lingkungan internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan tantangan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Matrik Analisis Keterkaitan Antara Faktor Internal dan Eksternal

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	1. Kuatnya dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah;	1. Belum optimalnya pembudayaan dan pembinaan disiplin dan loyalitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota Linmas;
	2. Adanya sistem pembagian kerja yang baik dan manajemen operasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan lapangan ;	2. kurang berkualitasnya SDM, banyaknya anggota Satpol PP dan anggota LINMAS yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS, Diklat Intelijen Satpol PP dan diklat LINMAS;
	3. Cepat tanggapnya sikap Polisi Pamong Praja dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat	3. Sarana dan prasarana kegiatan yang belum memenuhi syarat baik dari segi mutumaupun jumlah;
	4. Tidak adanya kesenjangan sosial antara pemimpin dan staf maupun anggota Polisi Pamong Praja	4. Masih kurangnya komunikasi yang efektif antara Satpol PP dengan masyarakat;
	5. Adanya komitmen aparatur untuk melaksanakan tugas dengan baik	5. Adanya kekosongan jabatan dalam struktur organisasi, kurangnya anggota SATPOLPP dan kurangnya PPNS;
		6. Terbatasnya dana operasional dan pemberian reward yang kurang memadai.
		7. Peralatan penanggulangan bencana masih minim
PELUANG (O)	STRATEGI (S - O)	STRATEGI (W - O)
1. Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kebijakan nasional dalam mendukung tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja;	1. Meningkatkan profesionalisme Aparat Polisi Pamong Praja guna mendukung tugas-tugas teknis administratif, teknis yuridis dan teknis operasional	1. Mengadakan sosialisasi PERDA maupun Kepala Daerah terhadap masyarakat secara intens dan berkala,
2. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat serta semangat reformasi;	2. Mengembangkan Program kerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat	2. Meningkatkan kualitas SDM Polisi Pamong Praja dan anggota LINMAS melalui pembinaan, pendidikan maupun Bimbingan teknis lainnya
3. Semakin demokratisnya kehidupan masyarakat;	3. Melakukan konsultasi kegiatan secara lebih intens dengan unsur pimpinan dalam mengoperasikan kegiatan	3. Merekrut staff baru yang berkompeten untuk mengisi kekosongan jabatan
4. Terjalinnnya hubungan dengan kepolisian, TNI, LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta komponen masyarakat lainnya;	4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat, aparat tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam menciptakan suasana tertib, tentram, damai dan tegaknya supremasi perda serta tanggap terhadap terjadinya bencana.	4. Pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kerja,
5. Tingginya kesadaran sikap dan komitmen masyarakat dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;		5. Mengusulkan tambahan anggaran biaya operasional,
6. Besarnya keinginan masyarakat untuk hidup rukun, tertib, tentram, aman, dan damai.		
7. Indeks Resiko Bencana yang relatif rendah		
TANTANGAN (T)	STRATEGI (S - T)	STRATEGI (W - T)
1. Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan perubahan sosial ekonomi (Pengaruh negatif dari globalisasi) ;	1. Memberi pemahaman terhadap warga masyarakat dan membantu mencari solusi dalam penanggulangan tambang inkonvensional ilegal dan penyakit masyarakat (PEKAT) seperti miras, prostitusi dan perjudian	1. Peningkatan kualitas & profesionalitas aparat Polisi Pamong Praja dan LINMAS melalui Pendidikan & pelatihan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat & menekan terjadinya pelanggaran PERDA,

2. Adanya tuntutan yang semakin meningkat terhadap kinerja Satpol PP di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum serta penegakkan PERDA;	2. Meningkatkan pelaksanaan operasional untuk mengembalikan fungsi peraturan Daerah maupun keputusan Kepala Daerah	2. Peran serta masyarakat dalam menunjang kinerja SATPOL PP
3. Image negatif masyarakat terhadap Polisi Pamong Praja dan memandang rendah terhadap tugas LINMAS;	3. Meningkatkan sosialisasi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat Penegak PERDA dan tugas anggota LINMAS,	3. Meningkatkan Koordinasi, pendataan dan evaluasi untuk mendapatkan data tentang pelanggaran PERDA
4. Kurangnya dukungan lembaga sosial politik local dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan keamanan;	4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan instansi pemerintah dan non pemerintah sampai ke tingkat ke bawah.	4. Mengadakan penambahan jumlah personil Polisi Pamong Praja, TIM Reaksi Cepat dan Tim Pemadam Kebakaran hingga mencapai jumlah memadai terhadap cakupan wilayah,
5. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan tupoksi;	5. Meningkatkan jalinan koordinasi aparat di tingkat lapangan	5. meningkatkan operasi-operasi penertiban.
6. Luasnya cakupan wilayah		
7. Perekonomian masyarakat yang lemah sehingga tingginya angka pengangguran		
8. Masyarakat tidak puas dengan dengan hasil PILKADA/kebijakan Pemerintah		
9. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana masih rendah (Disaster awareness);	6. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi situasi bencana.	

Dari analisis di atas, Sejumlah isu – isu strategis prioritas yang perlu mendapat perhatian ekstra untuk saat ini dan tahun-tahun yang akan datang terkait Peran Kepala PD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah dalam menghadapi Tantangan dan Peluang dan beban pekerjaan di 5 (lima) tahun mendatang adalah :

1. Analisa Kekuatan (Strength)

Kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Kuatnya dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah;
- b. Adanya sistem pembagian kerja yang baik dan manajemen operasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan lapangan ;
- c. Cepat tanggapnya sikap Polisi Pamong Praja dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat
- d. Tidak adanya kesenjangan sosial antara pemimpin dan staf maupun anggota Polisi Pamong Praja
- e. Adanya komitmen aparaturnya untuk melaksanakan tugas dengan baik

2. Analisa Kelemahan (Weakness) Tantangan

Kelemahan (Weakness) Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Belum optimalnya pemberdayaan dan pembinaan disiplin dan loyalitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota Linmas;
- b. kurang berkualitasnya SDM, banyaknya anggota Satpol PP dan anggota LINMAS yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS, Diklat Intelijen Satpol PP dan diklat LINMAS;
- c. Sarana dan prasarana kegiatan yang belum memenuhi syarat baik dari segi mutumaupun jumlah;
- d. Masih kurangnya komunikasi yang efektif antara Satpol PP dengan masyarakat;
- e. kurangnya anggota SATPOL PP dan kurangnya PPNS;
- f. Terbatasnya dana operasional dan pemberian reward yang kurang memadai.

3. Analisa Ancaman Satuan Polisi Pamong Praja meliputi :

Kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah masih belum menyeluruh.

4. Analisa Peluang (Opportunities)

Peluang (Opportunities) Satuan Polisi Pamong Praja adalah

- a. Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat
- c. Sinergisitas kepolisian, TNI, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta komponen
- d. Tingginya kesadaran sikap dan komitmen masyarakat dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Besarnya keinginan masyarakat untuk hidup rukun, tertib, tentram, aman, dandamai.

5. Analisa Ancaman (Threat)

Peluang Ancaman (Threat) Satuan Polisi Pamong Praja adalah

- a. Kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah/Keputusan Kepala

Daerah masih kurang;

- b. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi mengakibatkan pendatang dari daerah cukup tinggi dan memberikan usaha bagi pendatang (pedagang kaki lima dan lainnya) Berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Satuan Polisi

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022.

Adapun Strategi Kepala PD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dalam menetapkan Faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. **Strategi S + O** (mengoptimalkan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang)

yaitu :

- Meningkatkan profesionalisme Aparat Polisi Pamong Praja guna mendukung tugas- tugas teknis administratif, teknis yuridis dan teknis operasional;
- Mengembangkan Program kerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- Meningkatkan keikutsertaan masyarakat, aparat tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan dalam menciptakan suasana tertib, tentram, damai dan tegaknya supremasi perda serta tanggap terhadap terjadinya kebakaran (respon Time Rate).

2. **Strategi S + T** (menggunakan Kekuatan untuk mencegah dan mengatasi Ancaman) yaitu:

- Memberi pemahaman terhadap warga masyarakat dan membantu mencari solusi dalam penanggulangan tambang inkonvensional illegal dan penyakit masyarakat (PEKAT) seperti miras, prostitusi dan perjudian;

- Meningkatkan pelaksanaan operasional untuk mengembalikan fungsi peraturan Daerah maupun keputusan Kepala Daerah;
- Meningkatkan sosialisasi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat Penegak PERDA dan tugas anggota LINMAS;
- Meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan instansi pemerintah dan non pemerintah sampai ke tingkat ke bawah;
- Meningkatkan jalinan koordinasi lintas sektoral bersama aparat di tingkat lapangan.

3. **Strategi W + O** (mengurangi Kelemahan untuk memanfaatkan Peluang) yaitu:



- Mengadakan sosialisasi dan Pembinaan PERDA terhadap masyarakat secara intens dan berkala;
- Meningkatkan kualitas SDM Polisi Pamong Praja dan anggota LINMAS melalui pembinaan, pendidikan maupun Bimbingan teknis lainnya ;
- Pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kerja;
- Mengusulkan tambahan anggaran biaya operasional.

4. **Strategi W + T** (mengurangi Kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman) yaitu:

- Peningkatan kualitas & profesionalitas aparat Polisi Pamong Praja dan LINMAS melalui Pendidikan & pelatihan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat & menekan terjadinya pelanggaran PERDA;
- Peran serta masyarakat dalam menunjang kinerja SATPOL PP;
- Meningkatkan Koordinasi, pendataan dan evaluasi untuk mendapatkan data tentang pelanggar PERDA;
- Mengadakan penambahan jumlah personil Polisi Pamong Praja, TIM Reaksi Cepat dan Tim Pemadam Kebakaran hingga mencapai jumlah memadai terhadap cakupan wilayah;
- Meningkatkan operasi-operasi penertiban.

D. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

E. SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP
	Meliputi penutup beserta lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022. Visi pembangunan Kabupaten Bangka Tengah yang ingin dicapai adalah: **“Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Unggul”**.

Maksud visi di atas adalah :

Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Unggul Makna yang terkandung dari visi tersebut adalah Kabupaten Bangka Tengah memiliki keunggulan yang lebih di berbagai sektor pembangunan seperti sumber daya manusia yang unggul, ekonomi yang unggul, sarana prasarana yang unggul, lingkungan yang unggul dan layanan pemerintahan yang unggul. Unggul disini berarti memiliki kemampuan, dan/atau kekuatan, berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Semakin unggul berarti berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Bangka Tengah. Melalui Sumber Daya yang semakin unggul, tangguh dan berkualitas akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing, kemandirian daerah, dan juga dalam mendukung pembangunan nasional.

Penjelasan terhadap penjabaran visi tersebut adalah merupakan rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih

terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berkualitas Berdasarkan Iman dan Taqwa;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Unggul dan Berkelanjutan Melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK;
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik Yang Unggul dan Merata;
4. Mewujudkan Lingkungan Yang Unggul Serta Berkelanjutan;
5. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul

Perumusan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah mengacu pada Misi ke-5, yaitu : **“Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul”**

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi

Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 3 tujuan dan 4 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Kinerja Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang kondusif	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian K3	151	128	122	119	113	109
		Meningkatnya penegakan perda	Persentase Penegakan PERDA	107	115	112	109	105	102
3.	Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang handal dan efektif	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilaya Manajemen Kebakaran(WMK)	27	48	57	37	42	40

Sumber :Renstra Satuan Polisi Pamong Praja periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja serta RPJMD 2021-2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator - indikator kinerja yang ada dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 - 2026 yang memiliki fokus pada stockholder dan peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process).

Indikator kinerja Utama Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah yang akan digunakan untuk periode 2021 - 2026 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah

No.	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penanggung jawab	Sumber Data	Formulasi/Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	Kasatpol PP	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 tahun yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$
		Persentase Penegakan Perda/perkada	%	Kasatpol PP	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda/Perkada}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda / Perkada}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	Kasatpol PP	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu max 15 menit}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$

Sumber Data : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya (Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya). Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Berikut Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2022

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan pelayanan		79
			Nilai Akuntabilitas Kinerja		BB
			Kinerja Laporan Keuangan		SESUAI
2.	Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang kondusif	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian K3	Persen	100
		Meningkatnya penegakan perda	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100

3.	Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang handal dan efektif	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilaya Manajemen Kebakaran(WMK)	Persen	85
----	--	--	---	--------	----

Sumber :RencanaKerja Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenBangka Tengah tahun 2022

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tengah Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal xx bulan xx tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan masyarakat	79
			Nilai Evaluasi AKIP	BB
			Kinerja Laporan Keuangan	SESUAI
2.	Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan	100 %

	kondusif	Masyarakat	Keindahan)	
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %
3.	Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang handal dan efektif	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah Kebakaran	85%
		Jumlah Anggaran Tahun 2022		Rp. 10.483.094.038,-
1.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 3.944.680.210,-
2.		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Rp. 5.385.332.250,-
3.		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Rp. 1.153.081.578,-

Sumber : Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	
					T.A 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
					K	Rp
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Pelayanan OPD Sesuai Tupoksinya	Persen	100	3.655.359.328
I	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik		Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan	Persen	100	3.655.359.328
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	Persen	100	2.890.738.918

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	Persen	100	166.800.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	30.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	300.992.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	226.828.410
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	5.089.111.844
II	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat		Tingkat penyelesaian K3	Persen	100	5.089.111.844
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	1.263.866.844
III	Meningkatnya penegakan perda					
		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100	3.810.245.000
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100	15.000.000
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	Persen	100	916.368.828

IV	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif		Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	916.368.828
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	Persen	100	856.368.828
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	Persen	100	30.000.000
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	Persen	100	15.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	Persen	100	15.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberkan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasara.

Untuk mempermudah Interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran apakah melebihi target sesuai target dan tidak mencapai target, digunakan skala pengukuran dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Kemudian dianalisis untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang timbul, serta apakah kriteria yang telah ditentukan sudah cukup memadai untuk menilai, menggambarkan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja yang telah dicapai.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target

sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indicator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian %
1.	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan pelayanan	79	79	100 %
			Nilai akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB
			Kinerja Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang kondusif	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)	100	100	100
		Meningkatnya Penegakan Perda	Persentase Penegakan Perda	100	100	100
3.	Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang handal dan efektif	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85%	85.19%	100,22 %

Uraian penjelasan tabel :

1. Tujuan Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik

1.1 Sasaran Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik

a. Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja nilai mutu kepuasan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022 terealisasi dengan nilai mutu pelayanan sebesar 79 dari target 79. Dari hasil evaluasi tabel di atas juga dapat di simpulkan

bahwa capaian kinerja dari Indikator sasaran Nilai mutu kepuasan pelayanan dibandingkan sampai dengan akhir tahun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar 100 %.

Adapun yang menjadi unsur penilaian nilai mutu kepuasan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Nilai mutu kepuasan pelayanan Satpol PP Kab.Bangka Tengah Tahun 2022

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Nilai Konversi
1	2	3	4	5
U1	Persyaratan	3,56	0,34	8,42
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,45	0,34	9,50
U3	Waktu Penyelesaian	3,89	0,33	8,28
U4	Biaya/Tarif	3,78	0,44	11,00
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,56	0,35	8,64
U6	Kompetensi Pelaksana	3,44	0,32	8,00
U7	Prilaku Pelaksana	3,78	0,32	7,89
U8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,22	0,32	9,00
U9	Sarana dan Prasarana	3,78	0,33	8,28
Total Nilai		3,24	3,08	79,01

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerja sasaran nilai akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tahun 2022 tercapai sebesar 79,0 atau BB. Adapun penilaian kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Penilaian Kriteria Nilai Akuntabilitas Kinerja

Kriteria	Nilai Capaian
	2022
Perencanaan Strategis	10,00
Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT)	20,00
Pengukuran Kinerja	23,22
Pelaporan Kinerja	14,30
Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	12,00
Jumlah	79 (BB)

Nilai akuntabilitas kinerja Satpol PP pada tahun 2022 mengalami kenaikan di bandingkan dengan tahun 2021. Pada Tahun 2022 nilai akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tercapai 79% atau tercapai 100 %. Nilai akuntabilitas kinerja Satpol PP pada akhir RPJMD di targetkan mencapai nilai BB.

c. Kinerja Laporan Keuangan Satpol PP

Pada tahun 2022 nilai evaluasi Laporan Keuangan (LK) Satuan Polisi Pamong Praja terhadap LK Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah ditargetkan *sesuai* dan terealisasi *sesuai*. Hal ini turut mendukung predikat WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

2. Tujuan Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan yang Kondusif

2.1 Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

a. Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)

Indikator Sasaran Kinerja Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan) Merupakan Indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 mempunyai target kinerja sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau tercapai 100 %. Artinya hasil penyelesaian gangguan Ketertiban dan ketentraman umum pada tahun 2022 sebesar 100 % dan tidak ada hambatan dalam penyelesaian gangguan Ketertiban dan ketentraman umum. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah terus melakukan penertiban dalam rangka untuk mengurangi atau menekan meningkatnya gangguan Ketertiban dan ketentraman umum di Kabupaten Bangka Tengah.

Dari hasil tabel di atas, dapat dilihat bahwa Realisasi *Kinerja Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)* di tahun 2022 sangat baik dikarenakan jumlah gangguan Ketertiban dan ketentraman umum pada Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada warga negara

khususnya masyarakat yang terkena dampak kerugian materi dalam penegakan Perda dan Perkada.

Adapun data gangguan Ketertiban dan Ketentraman umum pada Tahun 2022 maupun jumlah yang ditindak lanjuti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	JENIS KEGIATAN	JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH PENYELESAIAN PELANGGARAN	YANG TIDAK TERSELESAIKAN
1.	LAPORAN MASYARAKAT	60	60	-
2.	DIPANTAU / INISIATIF KEDINASAN	68	68	-
	JUMLAH	128	128	-

Pada Tahun 2022 pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan dapat diselesaikan sebesar 100 %. Semua pelanggaran dapat diselesaikan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku.

Indikator Sasaran Kinerja Kinerja Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan) merupakan Indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun cara perhitungan dari indikator kinerja sasaran ini tahun 2022 dapat dilihat di bawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 tahun yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100 \%$$

$$= \frac{128}{128} \times 100 \%$$

$$= \mathbf{100 \%$$

2.2 Sasaran Meningkatnya Penegakan Perda

a. Persentase Penegakan Perda

Pada tahun 2022 mempunyai target kinerja sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau tercapai 100 %. Indikator sasaran Persentase penegakan perda adalah upaya pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong

Praja untuk menyelesaikan gangguan pelanggaran Perda/Perkada dari tahun ke tahun sehingga dapat tercipta lingkungan masyarakat yang kondusif dan demokratis sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa pelanggaran perda dan perkada dapat diselesaikan dengan capaian 100 %. Semakin tinggi capaian persentase pelanggaran Perda/Perkada maka semakin besar upaya pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengurangi atau menekan meningkatnya Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Realisasi capaian persentase Penegakan Perda/Perkada di tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik dengan bekerjasama dengan masyarakat dan OPD terkait. Secara garis Pemerintah Daerah melalui satuan Polisi Pamong Praja terus untuk berupaya dalam mengatasi dan menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban lingkungan dapat tercipta dengan kondusif.

Berikut data pelanggaran Perda/perkada pada Tahun 2022 maupun jumlah yang ditindak lanjuti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	JENIS KEGIATAN	JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH PENYELESAIAN PELANGGARAN	YANG BELUM TERSELESAIKAN
1.	LAPORAN MASYARAKAT	52	52	-
2.	DIPANTAU/INISIATIF KEDINASAN	63	63	-
	<i>JUMLAH</i>	115	115	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa laporan masyarakat yang ditindaklanjuti sebanyak 52 pelanggaran dan terselesaikan sebanyak 52 pelanggaran tanpa ada kejadian yang merugikan warga negara yang terkena dampak penertiban perda/perkada. Kemudian sesuai dengan tugas dan pokok serta fungsi dari satuan polisi pamong praja melakukan kegiatan dilapangan yang terdapat sebanyak 63 pelanggaran dan secara langsung dapat diselesaikan dengan sangat kondusif, sehingga jumlah keseluruhan dari

pelanggaran Perda/perkada pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 115 pelanggaran.

Indikator kinerja Sasaran Persentase Penegakan Perda merupakan Indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun cara perhitungan Indikator kinerja Sasaran Persentase Penegakan Perda dapat dilihat di bawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian penegakan Perda /Perkada}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/ Perkada}} \times 100\%$$

$$= \frac{115}{115} \times 100\%$$
$$= \mathbf{100\%}$$

Indikator sasaran persentase penegakan Perda adalah upaya pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan perda dan perkada sehingga dapat tercipta lingkungan masyarakat yang kondusif dan demokratis sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

3. Tujuan Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang Handal dan Efektif

3.1 Sasaran Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif

a. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Indikator sasaran kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2022 mempunyai target kinerja sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85,42% atau tercapai 100,22%. Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sesuai target. Hal ini terjadi dikarenakan cepat tanggapnya

(respon time) dari relawan pemadam kebakaran dalam menyelesaikan kebakaran. Semakin tinggi capaian Tingkat Waktu tanggap (Respon Rate Time) wilayah kebakaran maka semakin cepat upaya penanganan pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menanggulangi bencana kebakaran.

Capaian Persentase tingkat waktu tanggap terhadap bencana kebakaran tahun 2022 mengalami penyelesaian yang cukup baik artinya tingkat waktu tanggap terhadap kebakaran mengalami pencapaian target pada Tahun 2022.

Adapun data Jumlah kejadian Kebakaran Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel Kegiatan Peningkatan Operasi Pemadam Kebakaran di WMK Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 di bawah ini:

KEGIATAN PENINGKATAN OPERASI PEMADAM KEBAKARAN DI WMK KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022						
NO	DAERAH TERKENA BENCANA	JENIS BENCANA DAN LOKASI KEJADIAN	JUMLAH BENCANA	JUMLAH BENCANA YG TERTANGANI DLM WKT MAKS.15 MENIT	JUMLAH KASUS KEBAKARAN DALAM JANGKAUAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN	
1	KECAMATAN LUBUK BESAR	KEBAKARAN				
		DESA LUBUK PABRIK	1	1	-	
		KARHUTLA				
		DESA KULUR ILIR	-	-	-	
		DESA KULUR	-	-	-	
		DESA PERLANG	-	-	-	
		DESA TRUBUS	1	1	-	
		DESA BELIMBING	-	-	-	
		JUMLAH		2	2	-
		KEBAKARAN				
		DESA BATU BELUBANG	1	1	-	
		DESA AIR MESU	1	1	-	
		KARHUTLA				
		KARHUTLA				

2	KECAMATAN NAMANG	DESA NAMANG	-	-	-
		DESA JELUTUNG	-	-	-
		DESA BASKARA BAKTI	-	-	-
		DESA BELILIK	-	-	-
		DESA CAMBAI	-	-	-
		JUMLAH		2	2
3	KECAMATAN KOB A	KEBAKARAN			
		KEL. PADANG MULIA	-	-	-
		KEL. SP. PERLANG	-	-	-
		KEL. BEROK	2	2	-
		KARHUTLA			
		KEL. SIMPANG PERLANG	-	-	-
		KEL. KOB A	1	1	-
		KEL. ARUNG DALAM	4	4	-
		KEL. PADANG MULIA	3	3	-
		KEL. BEROK	3	3	-
		DESA KURAU BARAT	-	-	-
		DESA KURAU	6	6	-
		DESA NIBUNG	-	-	-
		DESA TERENTANG	1	1	-
		DESA PENYAK	-	-	-
		DESA GUNTUNG	-	-	-
		JUMLAH		20	20
4	KECAMATAN S.SELAN	KEBAKARAN			
		DESA SELAN	1	-	1
		DESA KERANTAI	-	-	-
		DESA KERAKAS	-	-	-
		DESA TANJUNG PURA	-	-	-
		KARHUTLA			
		DESA KERETAK	-	-	-
		DESA KERETAK ATAS	-	-	-
		DESA SARANG MANDI	-	-	-
		DESA KERANTAI	-	-	-
		DESA LAMPUR	-	-	-
JUMLAH		1	1	1	
		KEBAKARAN			
		DESA BUKIT KIJANG	-	-	-
		KELURAHAN DUL	2	1	1

5	KECAMATAN PANGKALAN BARU	KARHUTLA			
		KEL.DUL	-	-	-
		DESA AIR MESU TIMUR	-	-	-
		DESA MANGKOL	-	-	-
		DESA PEDINDANG	-	-	-
JUMLAH		2	1	1	
6	KECAMATAN S.KATIS	KEBAKARAN			
		DESA SIMPANG KATIS	1	1	-
		DESA TERAK	2	2	-
		DESA PASIR GARAM	1	1	-
		DESA BERUAS	1	1	-
		KARHUTLA			
		DESA SIMPANG KATIS	-	-	-
		DESA KATIS	-	-	-
		DESA PUPUT	-	-	-
		DESA PINANG SEBATANG	-	-	-
		DESA CELUAK	-	-	-
		DESA SUNGKAP	-	-	-
		DESA TERU	-	-	-
		DESA TERAK	-	-	-
		DESA PASIR GARAM	-	-	-
JUMLAH		5	5	-	
TOTAL KEJADIAN		32	31	3	

Realisasi Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di tahun 2022 mempunyai target sebesar 85 % dengan capaian 85,42 % atau dengan capaian sebesar 100,22 %. Jumlah kejadian kebakaran dalam jangkauan wilayah kebakaran pada tahun 2022 adalah sebanyak 32 kejadian kebakaran. Sedangkan jumlah kebakaran yang tertangani oleh Satuan polisi pamong praja khususnya bidang pemadam kebakaran dalam waktu maksimal 15 menit adalah sebanyak 31 kejadian kebakaran, jadi total kebakaran yang terjadi diwilayah Kabupaten Bangka Tengah selama Tahun 2022 sebanyak 67 kejadian.

Indikator Sasaran Kinerja Tingkat waktu tanggap (respon rate time) wilayah kebakaran merupakan Indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi

Pamong Praja. Adapun cara perhitungan dari indikator kinerja sasaran ini dapat dilihat di bawah ini :

Tingkat waktu tanggap (respon rate time) wilayah Kebakaran

$$= \frac{\text{Jmlh kasus kebakaran di wilayah kebakaran yg tertangani dlm wktu maks.l 15 mnt}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan wilayah Manajemen kebakaran}} \times 100$$

$$= \frac{41}{48} \times 100 \%$$

$$= 85,42 \%$$

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terwujud nya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan pelayanan	77	77	100 %	79	79	100 %
			Nilai akuntabilitas kinerja	BB	BB	100%	BB	BB	100%
			Kinerja Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	100%	Sesuai	Sesuai	100%
2.	Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang kondusif	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Meningkatnya Penegakan Perda	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang handal dan efektif	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85%	85.19%	100,22 %	85%	85.42%	100,22 %

Uraian penjelasan tabel :

1. Tujuan Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik

1.1 Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	2021			2022			Akhir RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan Publik	Nilai mutu kepuasan pelayanan	77	77	100%	79	79	100%	79	100%
	Nilai akuntabilitas kinerja	BB	BB	100%	BB	BB	100%	BB	100%
	Kinerja Laporan Keuangan Satpol PP	Sesuai	Sesuai	100%	Sesuai	Sesuai	100%	sesuai	100%

a. Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja nilai mutu kepuasan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 terealisasi dengan nilai mutu pelayanan sebesar 77

dari target 77 dengan capaian 100% dan pada tahun 2022 terealisasi 79 dari target 79 dengan capaian 100%.

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 sama dengan tahun 2022 terealisasi dengan nilai BB dari target BB dengan capaian 100%.

c. Kinerja Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja nilai Kinerja Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 sama dengan tahun 2022 terealisasi Sesuai dengan capaian 100%.

2. Tujuan Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan yang Kondusif

2.1 Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

Sasaran Strategi Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dengan indikator Sasaran sebagai berikut :

a. Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)

Adapun Perbandingan target serta realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dari sasaran strategis pertama ini dapat dilihat pada analisis capaian kinerja di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	2021			2022			Akhir RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1.	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%

Dari hasil tabel di atas, dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan) di tahun 2021 sama halnya dengan realisasi kinerja di tahun 2022 sangat baik dikarenakan jumlah gangguan Ketertiban dan ketentraman umum pada Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun Perbandingan Jumlah pelanggaran ketertiban, ketentraman dan Keindahan (K3) pada tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

NO.	LOKASI	JENIS PELANGGARAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	KEC. KOB A	TIBUMTRANMAS	50	25
		UNJUK RASA / DEMO	-	1
		JUMLAH	50	26
2	KEC. LUBUK BESAR	TIBUMTRANMAS	14	18
		UNJUK RASA / DEMO	-	-
		JUMLAH	14	18
3	KEC. NAMANG	TIBUMTRANMAS	16	22
		UNJUK RASA / DEMO	-	-
		JUMLAH	16	22
4	KEC. PANGKALAN BARU	TIBUMTRANMAS	30	21
		UNJUK RASA / DEMO	-	-
		JUMLAH	30	21
5	KEC. SIMPANG KATIS	TIBUMTRANMAS	15	19
		UNJUK RASA / DEMO	-	-
		JUMLAH	15	19
6	KEC. SUNGAI SELAN	TIBUMTRANMAS	26	22
		UNJUK RASA / DEMO	-	-
		JUMLAH	26	22
JUMLAH TOTAL			151	128

2.2 Sasaran Meningkatnya Penegakan Perda

Sasaran Strategi Meningkatnya Penegakan Perda dengan indikator Sasaran sebagai berikut :

a. Persentase Penegakan Perda

Adapun perbandingan target serta realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 dari sasaran strategis kedua ini dapat dilihat pada analisis capaian kinerja di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	2021			2022			Akhir RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
2.	Persentase Penegakan perda/perkada	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%

Dari hasil tabel di atas, dapat dilihat bahwa Realisasi capaian sasaran Persentase penegakan perda di tahun 2021 sama halnya dengan tahun 2022 tercapai sebesar 100 % atau terealisasi 100 %. Artinya gangguan pelanggaran Perda/Perkada dapat diselesaikan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 pelanggaran perda terjadi sebanyak 107 kali pelanggaran perda/perkada dan di tahun 2022 pelanggaran perda/perkada terjadi sebanyak 115 kali pelanggaran.

Adapun Perbandingan Jumlah pelanggaran Perda / Perkada pada tahun 2022 di banding dengan tahun 2021 dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

No	Kecamatan	Jenis Pelanggaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	
1	SUNGAI SELAN	Tambang Inkonvensional (TI)	6	7	(1)	10
		Miras/Mihol/Asusila	2	3	(1)	5
		Razia Pelajar	1	1	-	4
		Illegal Logging	-	-	-	-
		Pengemis	-	-	-	-
		Pengamen	-	-	-	-
		PKL	1	1	-	1
		Prostitusi	-	-	-	-
		Tambang Pasir	-	-	-	-
		Reklame	-	-	-	-
				Jumlah	10	12
						45
2	SIMPANG KATIS	Tambang Inkonvensional (TI)	20	19	1	-
		Miras/Mihol/Asusila	5	5	-	-
		Razia Pelajar	-	-	-	-
		Illegal Logging	-	-	-	-
		Pengemis	-	-	-	-
		Pengamen	-	-	-	-
		PKL	-	-	-	-
		Prostitusi	-	-	-	-
		Tambang Pasir	20	22	(2)	2
		Reklame	-	-	-	-
		Jumlah	45	46	(1)	47

						17
	NAMANG	Tambang Inkonvensional (TI)	-	-	-	6
		Miras/Mihol/Asusila	-	2	(2)	-
		Razia Pelajar	-	-	-	-
		Ilegal Logging	-	-	-	-
		Pengemis	-	-	-	-
		Pengamen	-	-	-	-
		PKL	-	-	-	-
		Prostitusi	-	-	-	-
		Tambang Pasir	-	-	-	2
		Reklame	-	-	-	-
			Jumlah	-	2	(2)
			-			
4	PANGKALAN BARU	Tambang Inkonvensional (TI)	-	2	(2)	23
		Miras/Mihol/Asusila	-	1	(1)	6
		Razia Pelajar	-	-	-	1
		Ilegal Logging	-	-	-	-
		Pengemis	-	-	-	6
		Pengamen	-	-	-	-
		PKL	-	-	-	-
		Prostitusi	-	-	-	-
		Tambang Pasir	-	-	-	2
		Reklame	-	-	-	-
			Jumlah	-	3	(3)
						4
5	KOBA	Tambang Inkonvensional (TI)	-	4	(4)	-
		Miras/Mihol/Asusila	-	2	(2)	2
		Razia Pelajar	-	-	-	-
		Ilegal Logging	-	-	-	-
		Pengemis	-	-	-	-
		Pengamen	-	-	-	2
		PKL	-	-	-	-
		Prostitusi	-	-	-	-
		Tambang Pasir	-	-	-	4
		Reklame	-	-	-	-
			Jumlah	-	6	(6)
6	LUBUK BESAR	Tambang Inkonvensional (TI)	20	18	2	40
		Miras/Mihol/Asusila	20	18	2	3
		Razia Pelajar	12	10	2	10
		Ilegal Logging	-	-	-	-
		Pengemis	-	-	-	-
		Pengamen	-	-	-	-
		PKL	-	-	-	-
		Prostitusi	-	-	-	-
		Tambang Pasir	-	-	-	-
		Reklame	-	-	-	-
			Jumlah	52	46	6
		JUMLAH	107	115	(8)	195

Dari tabel pelanggaran Perda/Perkada di atas terjadi pelanggaran Perda/Perkada di 6 Kecamatan yaitu kecamatan Sungai Selan, Simpang Katis, Namang, Pangkalan Baru, Koba dan Lubuk Besar, namun secara Keseluruhan Pelanggaran Perda/Perkada di tahun 2022 dapat teratasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tujuan Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang Handal dan Efektif

3.1 Sasaran Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif

Sasaran Strategi Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif dengan indikator Sasaran sebagai berikut :

a. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Sasaran strategis tiga Satuan Polisi Pamong Praja adalah *Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif* dengan indikator sasaran yaitu *Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)*.

Adapun perbandingan target serta realisasi kinerja tahun 2021 engan tahun 2022 dari sasaran strategis ketiga ini dapat dilihat pada analisis capaian kinerja di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	2021			2022			Akhir RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
3.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah Kebakaran	85%	85,19%	100,22%	85,42%	85,42%	100,22%	85%	85%

Dari hasil evaluasi tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Indikator sasaran Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate)

daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Capaian Persentase tingkat waktu tanggap terhadap bencana kebakaran tahun 2021 senilai 85,19% an pada tahun 2022 senilai 85,42% artinya mengalami penyelesaian yang cukup baik.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

N o.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7=5/6*100$
1.	Terwujud nya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Mutu Kepuasan pelayanan	100%	100%	100%
			Nilai akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB
			Kinerja Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Terwujudnya ketertiban dan Keamanan yang kondusif	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententrman dan Keindahan)	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penegakan Perda	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya Penanggulangan Kebakaran yang handal dan efektif	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen	100,22%	100%	100%

			Kebakaran (WMK)			
--	--	--	--------------------	--	--	--

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik

SASARAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET / SASARAN TA 2022		REALISASI TA. 2022				SALDO
			INDUK	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.944.680.210,00	4	Keg	4	91,31	3.601.964.732,00	91,31	342.715.478,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.284.627.000,-	12	OB	12	100	2.961.548.167,-	90,2	323.078.833,-
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	3.284.627.000,-	12	OB	12	100	2.961.548.167,-	90,2	323.078.833,-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	34.000.000,-	2	Keg	2	76,18	25.900.490,-	76,2	8.099.510,-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000,-	5	Paket	4	84,12	7.571.000,-	84,1	1.429.000,-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,-	5	ok	4	73,32	18.329.490,-	73,3	6.670.510,-
	Administrasi Umum Perangkat daerah	172.200.000,-	100	Persen	100	99,82	171.897.563,-	99,8	302.437,-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	3.000.000,-	12	Bulan	12	100	3.000.000,-	100	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,-	12	Bulan	12	100	18.000.000,-	100	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,-	12	Bulan	12	100	14.772.000,-	98,5	228.000,-

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,-	12	Bulan	12	100	9.999.850,-	100	150,-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,-	12	Bulan	12	100	1.176.500,-	98	23.500,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,-	30	OK	30	99,96	124.949.213,-	100	50.787,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.112.000,-	100	Pers en	98	98,16	216.068.437,-	98,2	4.043.563,-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.290.000,-	12	Bulan	12	100,	74.417.125,-	98,8	872.875,-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,-	12	Bulan	12	100,	34.342.262,-	95,4	1.657.738,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.822.000,-	12	OB	12	100,-	107.309.050,-	98,6	1.512.950,-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.741.210,-	100	Pers en	97	96,92	226.550.075,-	96,9	7.191.135,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.410.000,-	9	Unit	9	98,42	66.343.875,00	98,4	1.066.125,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.070.000,-	9	Unit	9	95,12	117.059.700,-	95,1	6.010.300,-
	Pemeliharaan Peralatan mesin Lainnya	25.000.000,-	13	Item	13	99,78	24.944.500,-	99,8	55.500,-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.261.210,-	12	Bulan	12	100	18.202.000,-	99,7	59.210,-

Guna mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik didukung oleh indikator kinerja yaitu *Nilai mutu kepuasan pelayanan, Nilai akuntabilitas kinerja, Kinerja Laporan Keuangan*.

Selain Program pendukung Indikator Kinerja Sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki program pendukung yang bersifat rutin untuk menunjang

kinerja kesekretariatan. Adapun Program dan kegiatan rutin tersebut dari segi target dan realisasi beserta persentase realisasi capaian dapat dilihat sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 3.944.680.210,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.601.964.732,- atau tercapai 91,31 %. Indikator dari program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini adalah Indeks Pelayanan OPD Sesuai Tupoksinya selama 12 bulan. Dimana realisasi fisik dari program ini tercapai 100 % dari target 100 %.

Program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 16 Sub kegiatan, adapun kegiatan beserta penjelasannya yaitu :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 3.284.627.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.961.548.167,- atau 90.2 %. Output kegiatan ini adalah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 12 bulan.

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 9.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.571.000,- atau 84,12 %. Output kegiatan ini adalah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan target 5 Paket. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 84,12 % dengan realisasi 4 Paket.

2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.329.490,- atau 73 %. Output kegiatan ini adalah laporan Perjalanan Dinas dengan target 5 orang/kali. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 73,32 % dengan realisasi 4 orang/kali.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100 %. Output kegiatan ini adalah Target out put dari kegiatan ini adalah pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik selama 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 12 bulan.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.000.000,- atau 100 %. Target out put dari kegiatan ini adalah pelayanan penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 12 bulan.

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan penyediaan makanan dan minuman memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.772.000,- atau tercapai 98,5 %. Target out put dari kegiatan ini adalah pelayanan penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 12 bulan.

4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

9.999.850,- atau tercapai 100 %. Target out put dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 12 bulan.

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.176.500,- atau tercapai 98 %. Target out put dari kegiatan ini adalah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan kantor selama 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 12 bulan.

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 124.949.213,- atau tercapai 100 %. Target out put dari kegiatan ini adalah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan sebanyak 30 Orang/Kali. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 30 Orang/Kali.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 75.290.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 74.417.125,- atau tercapai 98,8 %. Target out put dari kegiatan ini adalah pelayanan jasa surat menyurat selama 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 12 bulan.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan penyediaan komunikasi air dan listrik memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.342.262,-

atau tercapai 95,4 %. Target output dari kegiatan ini adalah pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik selama 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 12 Bulan.

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi anggaran sebesar Rp. 108.822.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 107.309.050,- atau tercapai 98.6 %. Target output dari kegiatan ini adalah jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 12 bulan.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 67.410.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 66.343.875,- atau tercapai 98,4 %. Target output dari kegiatan ini adalah pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan selama 12 bulan. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100%.

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.070.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 117.059.700,- atau tercapai 95,1 %. Target output dari kegiatan ini adalah kendaraan dinas operasional yang dipelihara sebanyak 9 unit. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %.

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.944.500 atau tercapai 99,8 %. Target output dari kegiatan ini adalah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara selama 13 Item. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %.

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 18.261.210,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.202.000,- atau tercapai 99,7 %. Target output dari kegiatan ini adalah luas gedung kantor yang dipelihara selama 12 bulan yaitu 73 M2. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %.

Tabel 3.9

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

2. Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

SASARAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	TARGET / SASARAN TA 2022		REALISASI TA. 2022				SALDO
			INDUK	VOL	SAT	FISIK	%	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.385.332.250	100	Persen	97	74,09	5.242.618.384	97,3	142.713.866
Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)	Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	1.052.280.000	100	Persen	98	98,25	1.033.917.170	98,3	18.362.830
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	159.000.000	128	Kasus	127	99,27	157.833.790	99,3	1.166.210

	Pengamanan, dan Pengawasan								
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	104.000.000	55	Kasus	55	100	103.679.880	99,7	320.120
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	789.280.000	4	Dokumen	4	97,86	772.403.500	97,9	16.876.500
Persentase Penegakan Perda	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / wakil Bupati	4.318.052.250	100	Persen	97	97,12	4.193.851.148	97,1	124.201.102
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	25.550.000	6	laporan	6	99,76	25.489.700	99,8	60.300
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.250.102.250	5	laporan	5	97,08	4.126.063.357	97,1	124.038.893
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	42.400.000	5	laporan	5	98,33	42.298.091	99,8	101.909
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	15.000.000	100	Persen	99	99	14.850.066	99,0	149.934
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	15.000.000	4	laporan	4	99	14.850.066	99,0	149.934

Guna mendukung tercapainya sasaran *Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat* yaitu *Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententeraman dan Keindahan)* dan *Persentase Penegakan Perda*

Adapun Program dan kegiatan tersebut dari segi target dan realisasi beserta persentase realisasi capaian dapat dilihat sebagai berikut :

b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 5.385.332.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.242.618.384,- atau tercapai 97,3 %. Dimana realisasi fisik dari indikator program ini tercapai 100 % dari target 100 %.

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 8 Sub kegiatan, dengan 2 (dua) Indikator sasaran yaitu :

1. Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)
2. Kegiatan Penanganan Gangguan ketertiban
3. Persentase Penegakan Perda

- **Indikator Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Kententraman dan Keindahan)**

Terdiri dari 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yaitu :

- 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.052.280.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.033.917.170,- atau terealisasi sebesar 98,3 %.

Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %. Output kegiatan ini adalah terealisasinya kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 128 kali penyelesaian dari target 128 kali penertiban pelanggaran.

- 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.**

Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.952.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

1.033.917.170,- atau terealisasi sebesar 98,3 %. Target output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyelesaian 128 Kasus. Realisasi Fisik kegiatan ini tercapai 99,27 % dengan realisasi 127 Kasus.

2) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

Sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 104.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 103.679.880,- atau terealisasi sebesar 99,7 %. Target output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyelesaian 55 Kasus. Realisasi Fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 55 Kasus.

3) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan Indikator sasaran Kinerja Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dalam mendukung penurunan gangguan ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp.789.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 772.403.500 ,- atau terealisasi sebesar 97,9 %. Target output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyelesaian 4 dokumen. Realisasi Fisik kegiatan ini tercapai 100 % dengan realisasi 4 dokumen.

• **Indikator Persentase Penegakan Perda**

Terdiri dari 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 25.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.489.700 ,- atau terealisasi sebesar 99,8 %. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %. Output kegiatan ini adalah terealisasinya kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebanyak 115 kali penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada dari yang ditetapkan target sebanyak 115 kali pelanggaran perda.

1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 25.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.489.700,- atau terealisasi sebesar 99,8 %. Realisasi fisik sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota adalah 100 %. Output kegiatan ini yaitu terealisasinya 6 kali sosialisasi terhadap 6 Perda / Perkada kabupaten Bangka Tengah (6 Laporan).

2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota memiliki alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 4.250.102.250-. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 4.126.063.357-. atau tercapai 97,1 %. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %. Output kegiatan ini adalah terbayarkannya gaji anggota Satpol pp honorer sebanyak 154 orang selama 12 bulan dan honor piket jaga malam anggota Satpol PP di 12 titik di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.42.400.000,- dan terealisasi Rp. 42.298.091 ,- atau terealisasi sebesar 99,8 %.

Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100%. Output kegiatan ini Pertama adalah terlaksananya pemberian 1 sangki yang diberikan terhadap pelanggaran perda/perkada yaitu tentang jual beli miras di kecamatan koba, output kedua adalah terlaksananya operasional Penertiban Pajak Daerah sebanyak 24 kali di 6 kecamatan kabupaten bangka tengah, output ketiga adalah terlaksananya penyelidikan yang terindikasi pelanggaran Perda dan Perkada sebanyak 5 kali.

2. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.850.066,- atau terealisasi sebesar 99 %. Realisasi fisik sub kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota adalah 100 %. Output kegiatan ini yaitu terealisasinya koordinasi lintas sektoral (OPD) dan pengawasan PPNS di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 4 Kali (4 laporan).

1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.850.066,- atau terealisasi sebesar 99 %. Realisasi fisik sub kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota adalah 100 %. Output kegiatan ini yaitu terealisasinya koordinasi lintas

sektoral (OPD) dan pengawasan PPNS di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 4 Kali (4 laporan).

Tabel 3.10

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

3. Meningkatnya Penanggulangan Kebakaran Secara Dini dan Komprehensif

SASARAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	TARGET / SASARAN TA 2022		REALISASI TA. 2022				SALDO
			KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDUK	VOL	SAT	FISIK	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.153.081.578	100	Persen	88	88,32	1.018.358.398	88,3	134.723.180
Meningkatnya Penanggulan gan Kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.093.081.578	4	OK	4	89,57	979.044.598	89,6	114.036.980
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	4	Dokumen	4	99,73	14.959.100	99,7	40.900
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	942.798.828	4	Dokumen	4	96,06	905.666.098	96,1	37.132.730
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	50.282.750	2	Dokumen	2	99,42	49.989.550	99,4	293.200
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	4	Dokumen	2	56,20	8.429.850	56,2	6.570.150
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	70.000.000	5	Unit	-	-	-	-	70.000.000
	Inpeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	30.000.000	100	Persen	97	97,41	29.224.100	97,4	775.900
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi	15.000.000	4	Dokumen	4	99,67	14.949.850	99,7	50.150

Kebakaran								
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	15.000.000	4	Dokumen	4	95,16	14.274.250	95,2	725.750
Investigasi Kejadian Kebakaran	15.000.000	100	Persen	17	17,33	2.600.000	17,3	12.400.000
Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	15.000.000	4	Dokumen	1	17,33	2.600.000	17,3	12.400.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	15.000.000	100	Persen	50	49,93	7.489.700	49,9	7.510.300
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	15.000.000	50	Orang	25	49,93	7.489.700	49,9	7.510.300

Dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif didukung oleh indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dalam menjalankan indikator kinerja sasaran Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah Kebakaran didukung oleh 1 (satu) program dan kegiatan yang dijelaskan sebagaimana di bawah ini :

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan program untuk mendukung Indikator sasaran Kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Indikator kinerja dari program ini adalah Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota dengan target sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 85, 22 %.

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 1.153.081.578,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.018.358.398,- atau tercapai sebesar 88,8 %. Program

Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran didukung oleh 4 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.093.081.578,- terealisasi sebesar Rp. 979.044.598 ,- atau terealisasi sebesar 89,6 %. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %. Output kegiatan ini adalah terealisasinya penyelesaian jumlah Kasus kebakaran dalam jangkauan WMK sebanyak 89 kali.

1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.959.100,- atau terealisasi sebesar 99,7 %.

Realisasi fisik kegiatan ini terealisasi sebesar 100 % yaitu Target output kegiatan ini adalah 63 titik kejadian operasi terhadap kejadian kebakaran dan terealisasi 100% kejadian khusus respon time atau sebesar 89 Kali.

2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 942.798.828 terealisasi sebesar Rp. 905.666.098,- atau terealisasi sebesar 96,1 %.

Realisasi fisik kegiatan ini terealisasi sebesar 100 % yaitu target output pertama kegiatan ini adalah kendaraan dinas/operasional pemadam kebakaran yang dipelihara yaitu sebanyak 3 unit, kemudian output kedua yaitu pembayaran honor dan uang jaga malam petugas

pemadam kebakaran selama 12 bulan (38 honorer) yang di tempatkan pada dua pos di kecamatan koba dan kecamatan simpangkatis. Output yang ketiga adalah petugas yang mengikuti bimtek sebanyak 7 orang, output keempat yaitu terkendalinya kebakaran dalam daerah sebanyak 70 kali antara lain kebakakaran hutan dan lahan.

3) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Sub Kegiatan ini Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran pada anggaran APBD 2022 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 50.282.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.989.550,- atau 99,4 %.

Realisasi fisik kegiatan ini terealisasi sebesar 100 % yaitu Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yaitu Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran dalam tingkat waktu tanggap di wilayah kebakaran sebanyak 30 kali kejadian kebakaran.

4) Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.429.850,- atau terealisasi sebesar 56,2 %.

Target output kegiatan ini adalah operasi penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah sebanyak 10 kejadian. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100 %.

5) Penanganan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan, Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Sub Kegiatan Penanganan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan, Kebakaran dan Alat Pelindung Diri memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau terealisasi sebesar 0 %.

Target output kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran sebanyak 5 unit. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 0 % dikarenakan pada kegiatan pengadaan sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri harganya melebihi dari pagu anggaran yang tersedia.

2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.

Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.224.100,- atau terealisasi sebesar 97,4 %.

Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %. Output kegiatan ini adalah Persentase pengendalian kebakaran yang terkendalikan sebanyak 89 kali Kasus kebakaran dalam jangkauan WMK.

1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.949.850,- atau terealisasi sebesar 99,7 %. Target output kegiatan ini adalah terpeliharanya alat pemadam api ringan proteksi kebakaran sebanyak 20 badan usaha. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100 %.

2) Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.274.250,- atau terealisasi sebesar 95,2 %. Target output kegiatan ini adalah Alat Proteksi Kebakaran yang dinilai sebanyak 20 unit. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100 %.

3. Investigasi Kejadian Kebakaran

Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.600.000,- atau terealisasi sebesar 17,3 %.

Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %. Output kegiatan ini adalah Persentase pengendalian kebakaran yang terkendalikan sebanyak 89 kali Kasus kebakaran dalam jangkauan WMK.

1) Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

Sub Kegiatan Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.600.000,- atau terealisasi sebesar 17,3 %. Target output kegiatan ini adalah frekuensi investigasi Alat Kebakaran yang dinilai sebanyak 20 Kali. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 17,3 % dengan realisasi 5 Kali

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.489.700,- atau terealisasi sebesar 49,9 %.

Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %. Output kegiatan ini adalah frekuensi pelatihan/simulasi dan penyuluhan sebanyak 3 kali.

1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.489.700,- atau terealisasi sebesar 49,9 %. Realisasi fisik kegiatan ini tercapai 100 %. Output kegiatan ini adalah frekuensi pelatihan/simulasi dan penyuluhan sebanyak 3 kali.

C. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Tabel 3.10
Program dan Kegiatan Rutin Pendukung Kinerja Kesekretariatan Tahun 2022

Sasaran RPJMD	Sasaran OPD Satpol PP	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja Anggaran Renja OPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD TA. 2022	
					Renja OPD TA. 2022		TA. 2022		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
					Target Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Pelayanan OPD Sesuai Tupoksinya		100%	3.944.680.210	91,31%	3.601.964.732	100%	91,31%
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik		Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan	Nilai	79	3.944.680.210	79	3.601.964.732	100%	91,31%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP		Sesuai	3.284.627.000	Sesuai	2.961.548.167	100%	90,16%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12 Bulan	3.284.627.000	12 Bulan	2.961.548.167	100%	90,16%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kegiatan	2 Keg	34.000.000	2 Keg	25.900.490	100%	76,18%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	5 Paket	9.000.000	4 Paket	7.571.000	84,12%	84,12%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis	Orang/ Kali	5 OK	25.000.000	4 OK	18.329.490	73,32%	73,32%

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	Persen	100%	172.200.000	100%	171.897.563	100%	99,82%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Bulan	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.000.000	100%	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan pelayanan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	18.000.000	100%	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan pelayanan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	14.772.000	100%	98,48%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	9.999.850	100%	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Bulan	12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.176.500	100%	98,04%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	Orang/ Kali	30 OK	125.000.000	30 OK	124.949.213	100%	99,96%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%	220.112.000	100%	216.068.437	100%	98,16%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	Bulan	12 Bulan	75.290.000	12 Bulan	74.417.125	100%	98,84%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Bulan	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	34.342.262	100%	95,40%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan jasa administrasi keuangan, Jumlah bulan pelayanan jasa	Bulan	12 Bulan	108.822.000	12 Bulan	107.309.050	100%	98,61%

			kebersihan							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	233.741.210	100%	226.550.075	100%	96,92%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Unit	9 Unit	67.410.000	9 Unit	66.343.875	100%	98,42%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah bulan pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit/ Bulan	9 Unit/12 Bulan	123.070.000	9 Unit/12 Bulan	117.059.700	100%	95,12%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Item	13 Item	25.000.000	13 Item	24.944.500	100%	99,78%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah luas gedung kantor yang dipelihara	M2	73 M2	18.261.210	73 M2	18.202.000	100%	99,68%

Tabel 3.11
Program Dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja
Satuan Polisi Pamong praja
Tahun 2022

Sasaran RPJMD	Sasaran OPD Satpol PP	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja Anggaran Renja OPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD TA. 2022	
					Renja OPD TA. 2022		TA. 2022		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
					Target Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran		
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100%	5.385.332.250	100%	5.242.618.384	100%	97,35%
	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat		Tingkat penyelesaian K3	Persen	100%	5.385.332.250	100%	5.242.618.384	100%	97,35%
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100%	1.052.280.000	100%	1.033.917.170	100%	98,25%
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	Jumlah Gangguan Rawan Konflik, Jumlah Operasi Pengamanan dan Pengawasan Pejabat Daerah, Jumlah Pencegahan Keamanan dan kenyamanan Jumlah pengamanan hari	Objek Kali Kali kegiatan	3 objek 20 kali 40 kali 3 kegiatan	159.000.000	3 objek 60 kali 100 kali 3 kegiatan	157.833.790	100%	99,27%

		Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan								
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	Jumlah Operasional Penertiban dari Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Operasi Penertiban Pajak Daerah Non	Kali Kali	100 kali 24 kali	104.000.000	100 kali 24 kali	103.679.880	100%	99,69%
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota LINMAS kab. Bangka Tengah aktif berkoordinasi Jumlah anggota linmas yang menerima asuransi Jumlah anggota linmas yang menerima honor	Orang	422 orang 422 orang 129 orang	789.280.000	422 orang 422 orang 129 orang	772.403.500	100%	97,86%
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kerjasama pengembangan kemampuan POL PP (bela diri militer, Senam Tongkat T (Kundun), Penyuluhan Hukum)	Lembaga	3 lembaga	-	3 lembaga	-	0%	0,00%
	Meningkatnya penegakan perda			Persen	100%	4.318.052.250	100%	4.193.851.148	100%	97,12%
		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100%	4.318.052.250	100%	4.193.851.148	100%	97,12%

		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada tersosialisasikan dan pembinaan	Perda	6 Perda	25.550.000	6 Perda	25.489.700	100%	99,76%
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah anggota Satpol PP yang menerima honor bulanan dan honor Piket khusus bagi pegawai tidak tetap Anggota SATPOL PP Kab. Bangka Tengah Jumlah Kepatuhan masyarakat terhadap perda /perkada	Orang Perda	160 orang 5 Perda	4.250.102.250	165 orang 5 Perda	4.126.063.357	100%	97,08%
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Berkas P 21 (lengkap) Jumlah Operasional Penertiban Pajak Daerah Jumlah Penyelidikan yang terindikasi pelanggaran Perda dan Perkada	Sanksi Kali Kali	2 Sanksi 24 kali 10 kali	42.400.000	10 Sanksi 24 kali 10 kali	42.298.091	100%	99,76%
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100%	15.000.000	100%	14.850.066	100%	99,00%
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Rapat Koordinasi PPNS	Kali	6 kali	15.000.000	6 kali	14.850.066	100%	99,00%
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	Persen	100%	1.153.081.578	100%	1.018.358.398	100%	88,32%

	Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif		Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100%	1.153.081.578	100%	1.018.358.398	100%	88,32%
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	Persen	100%	1.093.081.578	100%	979.044.598	100%	89,57%
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi titik rawan kebakaran	Titik	63 titik	15.000.000	63 titik	14.959.100	100,00 %	99,73%
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas/ operasional pemadam kebakaran yang dipelihara Jumlah pegawai kontrak pemadam kebakaran jumlah petugas damkar yang mengikuti bimtek Jumlah Terkendalinya Bencana Kebakaran dalam daerah	Unit Orang Orang Kali	3 Unit 38 Orang 7 Orang 70 kali	942.798.828	3 Unit 38 Orang 7 Orang 70 kali	905.666.098	100,00 %	96,06%
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi	Kejadian	30 Kejadian	50.282.750	30 Kejadian	49.989.550	100%	99,42%
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan operasi	Kejadian	10 Kejadian	15.000.000	12 Kejadian	8.429.850	120%	56,20%

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran	Unit	5 Unit	70.000.000	0 Unit	-	0%	0%
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	Persen	100%	30.000.000	100%	29.224.100	100%	97,41%
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Terpeliharanya Alat Pemadam Api Ringan Proteksi Kebakaran	Badan Usaha /Instansi /Pelaku Usaha	20 Badan Usaha/Instansi/Pelaku Usaha	15.000.000	20 Badan Usaha/Instansi/Pelaku Usaha	14.949.850	100%	99,67%
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Alat Proteksi Kebakaran	Unit	20 Unit	15.000.000	20 Unit	14.274.250	100%	95,16%
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	Persen	100%	15.000.000	100%	2.600.000	100%	17,33%
		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah frekuensi investigasi	Kali	20 kali	15.000.000	20 kali	2.600.000	100%	17,33%
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	Persen	100%	15.000.000	100%	7.489.700	100%	49,93%
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah frekuensi pelatihan/simulasi dan penyuluhan	Kali	3 kali	15.000.000	3 kali	7.489.700	100%	49,93%

Koba, Februari 2023

KAPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH



Ir. IRWAN, M.Tr.I.P
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP 196811281988101001

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 3 tujuan, 4 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 91,31%
- Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 98,25%
- Sasaran Meningkatnya Penegakan Perda terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 98%

- Sasaran Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 88,32%.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dari analisis capaian kinerja diatas diketahui bahwa 6 (enam) indikator atau 100,07 % mencapai baik sekali, walaupun dengan pencapain yang sangat baik, untuk kinerja satuan polisi pamong praja masih perlu ditingkatkan yaitu :

- Meningkatkan pelayanan baik dari segi kualitas pelayanan pengamanan dan kuantitas anggota dan sarana keamanan;
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang PERDA / PERKADA dan Pencegahan Kebakaran;
- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan satuan Linmas di setiap RT/sebutan lainnya kepada Kepala desa/lurah dan kepala RW;
- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya Perda / Perkada terhadap pelaksanaan ketertiban dan keamanan yang merupakan produk hukum daerah kabupaten bangka tengah;
- Upaya pencegahan kebakaran dalam rangka mengurangi resiko bencana kebakaran;
- Menambah jumlah armada pemadam kebakaran khususnya untuk mobil Supplay Air maupun mobil pemadam kebakaran;
- Menambah Jumlah pos pemadam kebakaran.
- Menambah Jumlah anggota pemadam kebakaran serta meningkatkan kompetensi anggota pemadam kebakaran yang ada.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai

target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 10.483.094.038,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.862.941.514,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 94,08% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 94,08%.

Adapun Program - program untuk mencapai Indikator Kinerja sasaran Satpol PP adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.

Bangka Tengah, Februari 2023

KAPALA SATUAN POLISINPAMONG

KABUPATEN BANGKA TENGAH



Drs. IRWAN, M.Tr.IP

Pembina Utama Muda/ IVc

NIP 196811281988101001